

## PENGARUH MIGRASI MASUK DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENGANGGURAN DI KOTA BANDA ACEH

Uswatul Hasanah<sup>1)</sup>, T. Zulham<sup>2)</sup>, Mahrizal<sup>3)</sup>, Affandi<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Teuku Umar

[Viera.meulaboh@gmail.com](mailto:Viera.meulaboh@gmail.com)

<sup>2)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

[teukuzulham@unsyiah.ac.id](mailto:teukuzulham@unsyiah.ac.id)

<sup>3)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

[Mahrizal@utu.ac.id](mailto:Mahrizal@utu.ac.id)

<sup>4)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

[affandi@utu.ac.id](mailto:affandi@utu.ac.id)

correspondent author : [Mahrizal@utu.ac.id](mailto:Mahrizal@utu.ac.id)

### Abstract

*This research was conducted in Banda Aceh with research variables consisting of in-house migration, provincial minimum wage and unemployment using secondary data based on the time of 2009-2018. This study used multiple regression analysis models, classic assumption tests, correlation coefficients (R), coefficient determination (R Adjusted), t test and F test. Based on this research obtained results that incoming migration has a positive and insignificant effect on unemployment with a sign value of  $0.081 > 0.05$  and the provincial minimum wage variable has a significant effect on unemployment with a significance of  $0.010 < 0.05$ . The coefficient value of determination was 64 percent, so independent variables influenced as much as 64 percent and the remaining 36 percent were influenced by other variables outside the study. It is expected that the results of this research can be a consideration for the banda aceh government in implementing policies to overcome the number of unemployed as well as other policies on migration and the provincial minimum wage.*

*Keywords: Incoming Migration, Provincial Minimum Wage and Unemployment*

### 1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu masalah besar bagi seluruh negara di dunia, seperti halnya yang kita ketahui bahwa masalah pengangguran seperti tidak ada ujungnya. Berbagai penyebab pengangguran sepertinya sangat sulit untuk dituntaskan semuanya bahkan sepertinya pengangguran memang masalah serius bagi setiap negara. Berbagai kebijakan terus diperbaharui oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan ini. Setiap negara, baik itu yang dikategorikan negara maju maupun negara yang sedang berkembang akan selalu menghadapi masalah pengangguran, hanya saja perbedaannya negara berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan kepada warga negaranya yang menganggur (Hartanto dan Masjkuri, 2017).

Indonesia merupakan negara yang tergolong negara yang memiliki jumlah pengangguran yang cukup tinggi, dikarenakan Indonesia kekurangan jumlah lapangan kerja yang memadai serta kemampuan sumber daya manusianya yang juga kurang memadai karena kurangnya skill/keahlian sehingga meskipun tersedianya lapangan kerja yang cukup untuk menampung

jumlah angkatan kerja maka jika tidak diiringi dengan suatu keahlian tertentu maka angkatan kerja yang tersedia juga tidak dapat ditampung maka akan menyebabkan pengangguran. Jika jumlah penduduk yang tinggi yang tidak menutup kemungkinan terdapat didalamnya jumlah pengangguran yang lumayan tinggi.

Salah satu faktor yang dianggap berpengaruh terhadap pengangguran yaitu migrasi, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya yang biasanya terjadi perpindahannya penduduk dari desa ke kota dengan tujuan yang berbeda-beda. Migrasi ada kalanya bersifat internasional dan bersifat nasional. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain baik dengan tujuan mendapatkan pekerjaan atau hal lainnya. Migrasi internasional dengan tujuan mencari pekerjaan akan memberikan tantangan tersendiri bagi negara tujuan karena pemerintah harus mengontrol jumlah migran yang datang agar tenaga kerja dalam negeri tidak mutlak tersaingi sehingga angka pengangguran meningkat. Ini merupakan hal-hal yang perlu diperhitungkan kembali dalam membuat suatu kebijakan migrasi dalam suatu negara. Negara pengirim migran juga harus bisa menyeimbangkan kepedulian pemerintah terhadap para migran, mencakup didalamnya tentang keamanan para migran, pemenuhan hak-haknya dan hal lain sebagainya. Sifat migrasi kedua yaitu migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk yang terjadi antar daerah, kabupaten, dan provinsi dalam suatu negara. Fenomena migrasi yang terjadi sekarang ini dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk menekan angka pengangguran dengan memanfaatkan peluang kerja antar daerah. Seperti yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu dengan mendistribusikan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang penduduknya sedikit. Migrasi merupakan suatu hal biasa terjadi, tetapi terkadang yang menjadi masalahnya itu ketika banyaknya jumlah penduduk yang melakukan migrasi ke suatu daerah tetapi tidak diiringi dengan tersedianya lapangan kerja di daerah tujuan. Kondisi demikian akan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di daerah tujuan.

Di Provinsi Aceh terdapat beberapa daerah yang sering menjadi daerah tujuan migrasi, salah satu daerah yang dinilai mampu memberikan tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi para migran adalah Kota Banda Aceh yang juga merupakan pusat administrasi dan berbagai kegiatan lainnya. Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para migran dari berbagai daerah baik itu daerah yang berasal dari Provinsi Aceh atau daerah luar provinsi yang ada di Indonesia bahkan dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Belanda, Britania Raya, Madagaskar dan Turki. Kota Banda Aceh merupakan daerah yang mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini dikarenakan oleh cukup tingginya jumlah penduduk yang melakukan migrasi ke Kota Banda Aceh baik yang datang sementara untuk sekedar mencari nafkah atau pindah untuk menetap dengan mengganti status kependudukan menjadi penduduk tetap Banda Aceh. Meningkatnya angka migrasi masuk dikarenakan tersedianya lapangan pekerjaan dengan berbagai jenis dan adanya perkembangan dan pertumbuhan yang pesat dibidang ekonomi terkhusus disektor perdagangan, perhotelan dan wisata, hal itulah yang menyebabkan penduduk dari daerah lain melakukan migrasi ke Kota Banda Aceh. Keadaan ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara ekonomi dengan mengkaitkan variabel jumlah masyarakat yang melakukan migrasi ke Kota Banda Aceh sehingga terjadinya kepadatan penduduk dan berpotensi menambah angka pengangguran.

Hal lain indikator dalam pengangguran yaitu upah, faktor pendorong bagi seorang penganggur untuk segera mendapatkan pekerjaan. Keinginan seseorang untuk bekerja dipengaruhi oleh besar kecilnya upah yang akan didapatkannya nanti. Diharapkan upah yang akan didapatkannya nanti mampu mencukupi kebutuhan hidupnya agar kesejahteraannya meningkat. Upah telah diatur dalam undang-undang dan setiap provinsi bahkan kabupaten/ kota memiliki upah minimum atau disebut juga upah terendah dengan jumlah tertentu, perbedaan tingkat upah ini dikarenakan biaya hidup setiap daerah itu

berbeda. Begitu pula dengan Provinsi Aceh yang memiliki tingkat upah tertentu. Setiap tahunnya upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi Aceh selalu meningkat, kenaikan ini dikarenakan kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya baik itu kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan. Maka dari itu upah yang ditetapkan pemerintah haruslah sesuai dengan kebutuhan pekerja yang harus disepakati bersama dengan perwakilan perusahaan, serikat pekerja dan juga bagian-bagian dari pemerintah seperti koordinator dari Dinas Tenaga Kerja dan juga dari pakar ekonomi.

Beberapa literasi dari Marpaung (2017) memberi argument bahwa migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan yang terus menerus terjadi melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di daerah perkotaan sangat mungkin terjadi. Maka tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan merupakan suatu hal lazim dikarenakan tidak seimbangannya antara kesempatan-kesempatan ekonomi di perkotaan dan pedesaan. Hanya penelitiannya menunjukkan hasil migrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kota Pekanbaru, sama halnya juga dengan Hasanah, et.al (2015) bahwa variabel migrasi masuk menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di kota pekabaru. Berbda halnya Glorina dan Sentosa (2019) menyatakan tidak ada kausalitas dua arah antara migrasi dan pengangguran namun terdapat hubungan satu arah antara migrasi dan pengangguran di Indonesia. Variabel lainnya menarik untuk dilihat dari literasi terdahulu ada Herman (2019) menyatakan Upah minimum kota tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru. Sedangkan Prawira (2018) upah minimum sebagian positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Syam dan Wahab (2015), menyatakan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Makassar. Serta yang terakhir Sirait dan Marhaeni (2013) tingkat upah minimum regional secara signifikan mempengaruhi pengangguran kabupaten/kota di provinsi Bali. Maka dari beberapa penelitian yang berbeda hasilnya menjadi menarik untuk di teliti di Kota Banda Aceh.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Migrasi

Menurut Mulyadi (2014) Komponen Pertumbuhan penduduk pada sisi migrasi merupakan salah satu dari ketiga faktor dasar yang juga sangat berpengaruh dalam menyumbang angka pertumbuhan penduduk. Pembahasan mengenai migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya faktor budaya, densitas (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor- faktor pendorong dan menarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi, adanya desentralisasi dalam pembangunan, serta di lain pihak semakin lancarnya komunikasi dan transformasi. Berdasarkan Munir (2013) migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu daerah ke daerah lain yang melampaui batas-batas administrasi, politik/negara, atau sering juga dikatakan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah yang lain. Dilihat dari kaitannya dengan sumber daya manusia, migrasi merupakan perpindahan sumber daya manusia yang biasanya disebabkan oleh alasan ekonomi, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan dan jenis pekerjaan serta alasan lain seperti keamanan.

Terdapat teori mengenai migrasi yang dikemukakan oleh Todaro dalam Puspitasari dan Kusreni (2017) yang menyatakan bahwa terjadinya migrasi didorong karena adanya perbedaan pendapatan antara wilayah kota dengan desa. Keputusan melakukan migrasi akan terjadi jika pendapatan di daerah kota dianggap lebih besar daripada pendapatan di desa, namun pada kenyatannya kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan sehingga mendorong angka pengangguran. Pengangguran akan terus terjadi meskipun angka pengangguran

sudah cukup tinggi. Hasanah et.al (2015) terdapat teori LFR (Lewis-FeiRannis) yang menyatakan bahwa perpindahan penduduk jika dilihat dari dasarnya terjadi oleh adanya perbedaan sektor kota yang modern dan sektor kota yang tradisional. Terdapat teori lain yang juga membahas mengenai migrasi seperti teori Lewis yang menyatakan bahwa faktor mendorong orang untuk pindah ke daerah lain adalah karena adanya perbedaan aliran pendapatan antara tempat asal dan tempat tujuan.

Teori mengenai migrasi juga pernah dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam Hartanto dan Masjkuri (2017, h. 3) yang berpendapat mengenai hubungan antara jumlah populasi, upah riil, dan inflasi ialah ketika populasi tumbuh lebih cepat daripada produksi makanan maka upah riil turun maka akan mempengaruhi tingkat pengangguran. Tetapi ketika upah riil meningkat maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya, sementara penawaran lebih tinggi daripada permintaan tenaga kerja maka hal tersebut akan menyebabkan tingkat pengangguran akan meningkat. Migrasi biasanya bersifat relatif permanen ketika seseorang memilih untuk pindah dari suatu daerah ke daerah lain baik karena faktor ekonomi yaitu untuk mencari pekerjaan atau karena faktor lainnya seperti perkawinan. Orang-orang bisa melakukan migrasi baik dari antar desa, kecamatan, kabupaten, antar provinsi, antar negara bahkan antar benua sekalipun. Dengan adanya migrasi disinilah terjadi proses pencampuran darah dan kebudayaan dalam masyarakat. Perpindahan dari daerah asal ke daerah tujuan migrasi diharapkan dapat memberikan perubahan dalam hidup mereka dari segi ekonomi, dengan pindah ke daerah tersebut mereka berasumsi akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan layak sehingga akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Faktor lain yang menjadi alasan seseorang melakukan migrasi yaitu faktor sosial, budaya dan luas lahan di suatu daerah tersebut (Ikhsan & Wali, 2014).

Sebagaimana dikemukakan Munir (2013, h. 137), ada faktor menyebabkan bermigrasi (pushfactors) seperti:

1. Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan, seperti menurunnya daya dukung lingkungan dan permintaan atas barang-barang tertentu.
2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal.
3. Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku.
4. Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan.
5. Bencana alam.

Sedangkan faktor-faktor penarik (pull factors) yang menyebabkan penduduk migrasi antara lain:

1. Harapan memperbaiki kehidupan.
2. Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik.
3. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan.
4. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan atau pusat kebudayaan.

Terdapat kondisi dimana seseorang yang tinggal di daerah perdesaan harus memilih untuk tetap bertempat tinggal di desanya dengan keadaan ekonomi yang terbatas atau melakukan migrasi pindah ke daerah lain tetapi harus meninggalkan mata pencahariannya di desa seperti seorang petani yang harus meninggalkan ladang atau sawahnya.

## Upah

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya

dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas (Rivai dan Sagala, 2013). upah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pihak perusahaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja/buruh. Menurut Rivai dan Sagala (2013, h. 761) Upah minimum Indonesia didasarkan pada kebutuhan hidup minimum pekerja 'lajang'. Upah minimum provinsi (UMP) tidak memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Karena itu, UMP dijadikan sebagai batas minimal upah pekerja pada masa kerja 0.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap Provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Menurut Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), "Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi".

**Pengangguran**

Pengangguran menurut Sukirno (2015, h. 355) adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya. Individu yang mengalami masalah tersebut dinamakan penganggur. Apabila para penganggur tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, keadaan itu dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran merupakan penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2019).

Menurut Sumarsono (2009) pengangguran adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur. Sedangkan menurut penulis, pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau bekerja kurang dari 40 jam/minggu.

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih berdasarkan Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh merupakan daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan yang begitu pesat sehingga menjadi daerah yang diminati orang dari berbagai daerah untuk melakukan migrasi yang berpotensi meningkatkan pengangguran. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2009- 2018 diperoleh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh dan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh . Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda yang harus melalui beberapa tahap pengujian Uji Asumsi Klasik. Perkiraan model regresi Ln Log Natural adalah Sebagai Berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e.....(1)$$

Variabel di transformasi ke Persamaan (1) sehingga menjadi

$$\text{LnPGR} = \alpha + \beta_1 \text{LnMGM} + \beta_2 \text{LnUMP} + e.....(2)$$

Dimana

- LnPGR = Pengangguran
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi
- LnMGM = Migrasi Masuk
- Ln UMP = Upah Minimum Provinsi
- i = Suku Bunga
- e = Error Term

### Pengujian model Goodness of Fit (Uji Kesesuaian)

Untuk melihat *Goodness of Fit* (uji kesesuaian) dari hipotesis tersebut maka perlu dilakukan uji statistik, yaitu: Koefisien Determinasi ( $Adj R^2$ ), T-test (Uji Parsial) dan F-statistik (Uji Simultan)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Regresi Data

Hasil regresi untuk mengetahui Pengaruh Migrasi Masuk dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Kota Banda Aceh, diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Estimasi Pengaruh Migrasi Masuk dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Kota Banda Aceh**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
Konstanta	11,737	1,939		6,052	0,001	
MGM	0,413	0,203	0,509	2,039	0,081	Tidak Signifikan
UMP	-0,440	0,126	-0,872	-3,491	0,010	Signifikan
R	= 0,801					
R <sup>2</sup>	= 0,642					
α.	= 0.05					
D-W	= 2.001					

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

$$\text{LnPGR} = 11,737 + 0,413 \text{ LnMGM} - 0,440 \text{ Ln UMP} + e$$

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

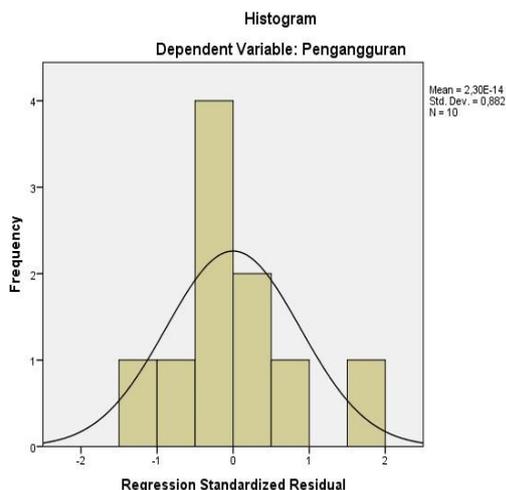
1. Nilai konstanta ( $\beta_0$ ) dapat diartikan bahwa, nilai konstanta sebesar 11,737 dan UMP sama dengan nol maka pengangguran di Kota Banda Aceh naik sebesar 11,737
2. Koefisien Migrasi Masuk ( $\beta_1$ ) sebesar 0.413 ,menggambarkan Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel X1 (migrasi masuk) sebesar 0,413. Hal ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan sebesar 1 Persen terhadap variabel migrasi masuk maka akan berpengaruh terhadap pengangguran sebesar 41,3 Persen. dan variabel di luar model ini tetap (*ceteris paribus*).
3. Koefisien UMP ( $\beta_2$ ) sebesar 0,440 menggambarkan bahwa koefisien nilai X2 (upah minimum provinsi) sebesar 0,440. Hal ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan sebesar 1 Persen terhadap variabel upah minimum provinsi maka akan berpengaruh

terhadap variabel pengangguran sebesar 44 persen. dan variabel di luar model ini tetap (*ceteris paribus*).

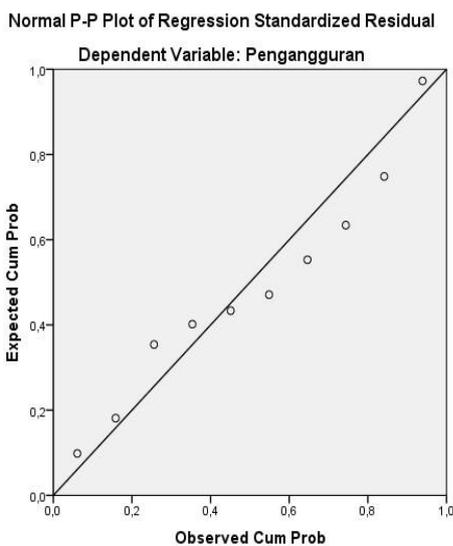
**Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Normalitas

Grafik 4.1 Histogram



Grafik. 4.2 Normal probability plot



Sumber: Output SPSS (diolah Februari 2020)

Berdasarkan grafik 4.1 dan grafik 4.2 tersebut, dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal karena garis histogram tegak lurus dan tidak menceng ke kiri dan ke kanan, sedangkan untuk normal probability plot titik-titik yang tersebar berada di sekitar garis diagonal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Untuk melihat multikolinearitas atau korelasi yang sangat tinggi atau rendah terjadi pada hubungan antara variabel bebas maka cara melihatnya yaitu dengan melihat nilai VIF, dimana jika  $VIF < 10$  maka tidak terjadi gejala multikorelasi diantara variabel bebas, sedangkan jika nilai  $VIF > 10$  maka terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas.

Tabel 4.2  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
MGM	0,819	1,221
UMP	0,819	1,221

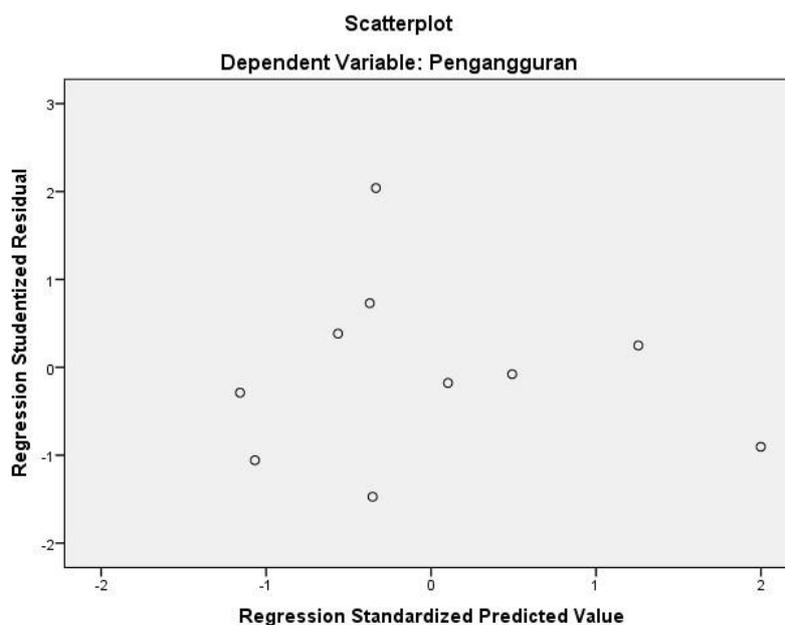
Sumber: Hasil Pengolaan SPSS (diolah Februari 2020)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa dari variabel Migrasi Masuk memperoleh nilai VIF adalah 1,221, kemudian variabel UMP VIF yang diperoleh adalah 1,221 yang artinya semua variabel bebas diperoleh nilai VIF lebih kecil dari 10 (  $VIF < 10$  ), Maka dengan demikian dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolerasi di antara variabel bebas.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik/plot. Cara untuk melihat ada tidaknya terjadi gejala heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik 4.3 berikut ini :

Grafik 4.3 Scatterplot



Sumber: Output SPSS (diolah Februari 2020)

Berdasarkan grafik 4.3 diatas maka terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik bagian atas angka nol maupun bagian bawah angka nol pada sumbu vertikal (Y) maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**d. Uji Autokorelasi**

Cara untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melihat tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.3  
Uji Autokorelasi

Model	R	R <sup>2</sup>	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Waston
-------	---	----------------	-------------------	----------------------------	----------------

1	0,801 <sup>a</sup>	0,642	0,540	,10821	2,001
---	--------------------	-------	-------	--------	-------

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS (data diolah Februari 2020)

Pada tabel 4.3 dilihat bahwa Alpha ( $\alpha = 5\%$ ) dengan jumlah variabel bebas (K) = 2 dan jumlah observasi (n) = 10, maka dari tabel DW dijelaskan bahwa:

Nilai dL = 0,697

Nilai dU = 1,641

DW = 2,001

4-dL =  $4 - 0,697 = 3,303$

4-dU =  $4 - 1,641 = 2,359$

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai DW berada dU dan 4-dU yaitu  $2,001 > 1,641 < 2,359$ , artinya tidak terjadi gejala Autokorelasi.

### Goodness Of Fit Test (Uji Kesesuaian)

#### a. Koefisien Korelasi (R)

Hasil pengolahan data dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi variabel bebas (migrasi masuk, upah minimum provinsi) di peroleh  $R = 0,801$ , artinya hubungan antara variabel migrasi masuk dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran adalah sebesar 0,801 secara positif dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan korelasi antara variabel migrasi masuk dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran dengan keeratan 80%. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa hubungan migrasi masuk dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Kota Banda Aceh sangat kuat.

#### b. Koefisien Determinasi (Adj. R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil Regresi nilai koefisien determinasi sebesar 0,642 atau 64 Persen, artinya pengangguran dapat dipengaruhi oleh migrasi masuk dan upah minimum provinsi. Sedangkan sisanya yakni sebesar 36% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

#### c. T-test (Uji Parsial)

Berdasarkan uji-t pada tingkat keyakinan 94 persen dapat diketahui bahwa :

1. Nilai Sig. Migrasi Masuk  $> \alpha$ . adalah sebesar  $0,081 > 0,05$  dan nilai T hitung 2,039 dan T. tabel 2,365 (T hitung  $<$  T tabel) maka H<sub>0</sub> ditolak H<sub>1</sub> di terima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel migrasi masuk dengan pengangguran di Kota Banda Aceh. Alasannya karena para migran yang datang ke Kota Banda merupakan migran yang produktif, mereka datang ke Kota Banda Aceh tidak hanya mencari kerja tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan juga ada yang sudah memiliki pekerjaan tetapi pindah kerja ke Kota Banda Aceh.
2. Nilai Sig. Upah Minimum Provinsi  $< \alpha$ . nilai signifikan untuk pengaruh upah minimum provinsi terhadap pengangguran adalah  $0,010 < 0,05$  dan nilai T hitung 3,491  $>$  T tabel 2,365 maka dapat dikatakan H<sub>0</sub> diterima H<sub>1</sub> ditolak, artinya secara parsial atau individu berpengaruh negatif signifikan antara UMP terhadap pengangguran di Kota Banda Aceh. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) akan menurunkan jumlah pengangguran.

#### d. F-test (Uji Simultan)

Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa F hitung  $>$  F tabel yakni  $6,281 > 4,46$  dengan nilai derajat signifikan 0,027b pada tingkat nyata  $\alpha = 0,05$  (derajat signifikan) maka hal

menunjukkan bahwa variabel bebas (migrasi masuk dan upah minimum provinsi) terhadap variabel terikat (pengangguran) berpengaruh secara signifikan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara migrasi masuk terhadap pengangguran di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan migrant yang datang kebanyakan merupakan migran yang produktif yaitu mereka yang datang ke Kota Banda Aceh tidak hanya mencari pekerjaan tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan ada juga yang sebelumnya sudah mempunyai pekerjaan lalu pindah ke Kota Banda Aceh. Variabel upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kota Banda Aceh karena naiknya UMP akan mendorong orang-orang untuk mencari pekerjaan.
2. Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel migrasi masuk berpengaruh positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,081.
3. Berdasarkan uji t individual (parsial) menunjukkan bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,010.
4. Besarnya hubungan variabel migrasi masuk dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran sebesar 80 Persen.
5. Pengaruh variabel migrasi masuk terhadap pengangguran yaitu sebesar 10,94 persen dan pengaruh upah minimum provinsi terhadap pengangguran yaitu sebesar 89,06 Persen serta pengaruh kedua variabel independen terhadap dependen yaitu sebesar 64 persen.

### Saran

1. Pemerintah daerah khususnya Kota Banda Aceh dituntut untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan membuat pelatihan secara rutin guna meningkatkan skill tenaga kerja lokal sehingga masyarakat dapat lebih produktif serta kebijakan-kebijakan guna mengontrol jumlah migrasi agar tidak terjadi kepadatan penduduk di suatu daerah tertentu sehingga beresiko meningkatkan angka pengangguran jika migran tersebut tidak produktif.
2. Pemerintah daerah lainnya juga harus melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya kawasan yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung perkembangan daerah tersebut seperti transportasi dan komunikasi serta lapangan kerja yang memadai guna mengatasi maraknya penduduk yang bermigrasi ke Kota Banda Aceh sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan data primer dan menambahkan variabel lain serta membahas masalah pengangguran dengan lebih luas agar nantinya dapat ditemukan cara-cara baru guna mengatasi masalah pengangguran tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tahun 2009-2019 berbentuk laporan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh tahun 2009-2018 berbentuk laporan.

Hartanto, T. B. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 20-30.

- Hasanah, et. al. 2015. Pengaruh Migrasi Masuk dan Investasi Terhadap Pengangguran di Kota Pekanbaru. JOM Fekon, Vol. 2 No. 1.
- Herman. 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pekanbaru tahun 2010- 2017. Vol. 15, No. 2, July 2019, hlm. 220-232.
- Ikhsan, dan Wali, M. 2014. Analisis Migrasi Ke Kota Banda Aceh. Volume 1. Nomor 1. Kota Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2010-2019.
- Marpaung, Julianti Maria. 2017. Pengaruh Migrasi Masuk dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014. JOMFekon, Vol.4 No.1.
- Munir, R. 2013. Dasar-dasar Demografi. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). HYPERLINK "<https://apindo.or.id/id/regulasi/ketenagakerjaan/peraturan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-7-tahun-2013-tentang-upah-minimun>" diakses pada 26 Januari 2020.
- Prawira, Syurifto. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Volume 1, Nomor 1, 5 Maret 2018.
- Puspitasari, W. I., & Kusreni, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 3. (Juni 2017; 02 (1): 49-64 ISSN 2541-1470)..
- Rivai, V. dan Ella Jauvani, Sagala. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, S.. 2014. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sirait, Novlin dan Marhaeni, A. A. I. N. 2013. Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 2.
- Syam, Syahrina dan Abdul Wahab. 2015. Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkassar. Volume 1 Nomor 1, Juni 2015: 35-54.
- Sukirno, Sadono. 2015. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2009. Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Todaro, M.P., & Smith, 2003., Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga jilid 1, Erlangga, Jakarta